

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Jepang adalah negara yang mempertahankan banyak norma dan sikap patriarki kuno. Kontribusi laki-laki kepada masyarakat dinilai dalam kemampuan produktif seperti pekerjaan, pangkat kerja, dan tugas militer hingga akhir abad ke-19, sementara perempuan dihargai atas dukungan rumah tangga untuk aktivitas suami mereka dan membesarkan generasi berikutnya. Terlepas dari kenyataan bahwa Jepang adalah negara maju, ketidaksetaraan gender masih menjadi masalah utama. Diskriminasi terhadap perempuan mengakibatkan adanya Gender Pay Gap atau kesenjangan gaji antara laki laki dan perempuan, representasi Perempuan di politik rendah, ketimpangan dalam dunia kerja, dan terjadinya pelecehan seksual. UN Women sebagai organisasi internasional yang mendukung pemberdayaan Perempuan di dunia, membantu Jepang untuk mengurangi diskriminasi terhadap Perempuan di Jepang. Lalu penulis mencoba menganalisa peran UN Women di Jepang sebagai Instrumen, Aktor Independen, dan Arena sesuai dengan konsep peran organisasi Internasional milik Clive Archer.

Sebagai instrumen, Jepang menggunakan UN Women menjadi alat kerjasama dengan pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya dalam mengembangkan kebijakan dan legislasi yang mempromosikan kesetaraan gender dan membela hak-hak perempuan. Direalisasikan di Jepang, partisipasi perempuan di tempat kerja telah didukung undang-undang sejak

diundangkannya pada 1 April 2016. Undang-Undang Kemajuan Partisipasi Perempuan dan Kemajuan di Tempat Kerja mewajibkan perusahaan sektor publik dan swasta untuk mengukur data terkait keragaman gender dan mengembangkan rencana aksi untuk mengatasi kesenjangan. Lalu sebagai aktor independen, UN Women berperan sebagai aktor independen yang memiliki kapasitas untuk bertindak secara global dan membuat keputusan independen tanpa pengaruh luar organisasi yang mempengaruhi atau mengganggu. Disini UN Women menandatangani Memorandum of Understanding (MOU) yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran di seluruh negeri tentang pentingnya kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan. Lalu yang terakhir sebagai arena, UN Women menyediakan arena untuk pertemuan, konferensi, dan diskusi internasional. Ini adalah tempat di mana para pemangku kepentingan dapat berbicara tentang masalah isu perempuan dan mencari solusi bersama. Pelaksanaan peran UN Women sebagai arena di Jepang mencakup berbagai kegiatan yang ditujukan untuk memajukan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan. UN Women Japan Liaison Office adalah komponen penting dari upaya UN Women untuk mempromosikan kesetaraan gender dan pemberdayaan wanita. Kedua adanya WAW! sebagai konferensi untuk menyuarakan masalah terkait gender. Terakhir yaitu Shiseido Menandatangani Perjanjian dengan UN Women untuk Memimpin Promosi Kesetaraan Gender di Jepang dan #NoBagForme sebagai kampanye untuk mempromosikan Kesetaraan Gender di Jepang.

Kerjasama antara pemerintah Jepang dan UN Women telah berkembang secara bertahap, dan secara langsung terkait dengan prakarsa gender dan pembangunan nasional Jepang, serta posisi kepemimpinan negara secara lokal dan global. Pemerintah Jepang menghormati kontribusi besar perempuan terhadap ekonomi nasional dan rumah tangga. Hal ini menghasilkan peningkatan investasi dalam partisipasi, kepemimpinan, dan retensi angkatan kerja perempuan baik di sektor publik maupun komersial. Perspektif dan kebijakan gender memiliki pengaruh pada masyarakat dan ekonomi Jepang, serta pemberdayaan perempuan di Jepang dan di seluruh dunia.

5.2 Saran

Berdasarkan penelitian penulis mengenai Peran UN Women dalam mengatasi Diskriminasi Perempuan di Jepang pada tahun 2014-2021, dengan ini penulis menyarankan untuk penelitian kedepannya untuk mengetahui dan mempelajari lebih lanjut tentang bagaimana peran UN Women dengan pemerintah Jepang atau NGO (Non-Governmental Organization) agar mengetahui bagaimana Kerjasama NGO dan UN Women dalam mengatasi diskriminasi gender di Jepang. Melalui jaringan dan pengalamannya di berbagai negara, UN Women dapat terus mempromosikan kesetaraan gender dan partisipasi pemilu yang inklusif di Jepang. UN Women dapat terus bekerja sama dengan pemerintah Jepang dan masyarakat sipil untuk merancang dan menerapkan undang-undang, kebijakan, program, dan layanan yang memberdayakan perempuan dan anak perempuan untuk mengklaim hak mereka dan memperluas peluang mereka.